

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Australia merupakan salah satu negara yang memiliki posisi strategis dalam peta pendidikan internasional. Kombinasi antara reputasi lembaga pendidikan yang unggul, kualitas hidup yang tinggi, serta peluang kerja pasca studi menjadikan Australia sebagai destinasi utama bagi mahasiswa internasional (OECD, 2021). Dalam beberapa dekade terakhir, mahasiswa asing tidak hanya berkontribusi pada dunia akademik, tetapi juga memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusi ini tercermin melalui pembiayaan pendidikan, pengeluaran untuk biaya hidup, serta permintaan terhadap akomodasi.

Pemerintah Australia bahkan menyatakan bahwa *“International education is a new engine of economic growth for Australia and an important part of our social fabric”* (Department of Home Affairs, 2023c). Pernyataan ini menegaskan bahwa pendidikan internasional tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga memperkuat struktur sosial dan keberagaman masyarakat Australia. Oleh karena itu, Australia memandang keberadaan mahasiswa internasional sebagai aset penting bagi pembangunan berkelanjutan negaranya.

Sejak tahun 2008–2009, industri pendidikan internasional telah menyumbang sekitar AUD \$15,8 miliar ke perekonomian nasional dan terus menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun (Spinks, 2015). Sebagai penguat dari argumen ini,

tabel di bawah menunjukkan besarnya komposisi mahasiswa internasional di Australia dalam beberapa tahun terakhir.

Tabel 1.1 Persentase Populasi Kedatangan Visa Sementara Australia

Kategori	Persentase
Mahasiswa - VET	4.95%
Mahasiswa - Perguruan Tinggi	26.50%
Siswa - lainnya	7.67%
Terampil (sementara)	12.56%
Working holiday	11.59%
Pengunjung	24.37%
Lainnya (sementara)	12.37%

Sumber: Diolah dari Australian Bureau of Statistic (2024)

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam tabel, pelajar internasional, khususnya untuk mahasiswa, menempati proporsi yang signifikan dalam jumlah pemegang visa, yang termasuk ke dalam kategori visa sementara (*temporary visa*) di Australia. Hal ini diperkuat oleh laporan dari Biro Statistik Australia (Australian Bureau of Statistic) yang mencatat bahwa pada tahun 2024 terdapat sekitar 577.295 mahasiswa internasional yang masuk sebagai imigran, menjadikan mereka kelompok terbesar di antara kategori imigran lainnya. Dengan itu, penulis memfokuskan penelitian pada kategori mahasiswa Perguruan Tinggi dan VET (Vocational and Education Training). Dari adanya fakta tersebut menjelaskan bahwa mahasiswa internasional bukan hanya menjadi bagian dari mobilitas global,

tetapi juga memainkan peran penting dalam sistem imigrasi Australia. Hal ini juga dinyatakan oleh Pemerintah Australia, “*International education is a key national asset*” (Department of Home Affairs, 2023a). Keberadaan mahasiswa internasional dianggap menjadi bagian penting dalam kebijakan imigrasi, yang dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk memperkuat reputasi pendidikan Australia ataupun penggerak ekonomi, tetapi juga membentuk masyarakat yang heterogen dengan keragaman budaya (*cultural diversity*) (Department of Home Affairs, 2023c).

Akan tetapi, perlu diketahui bahwa lonjakan arus migrasi internasional memunculkan berbagai tantangan baru, salah satunya terkait penyalahgunaan visa pelajar. Australia harus dihadapkan oleh dilema. Di satu sisi, banyaknya mahasiswa internasional sebagai sumber eksport terbesar di sektor pendidikan bagi Australia (Department of Home Affairs, 2023a). Namun, di sisi lain Australia harus menghadapi tekanan dalam negeri seperti naiknya permintaan untuk akomodasi mahasiswa berupa asrama (*dorm*), penurunan kredibilitas dan integritas sistem pendidikan, sehingga berdampak pada banyaknya mahasiswa yang bekerja tidak sepadan dengan keahlian mereka (Department of Home Affairs, 2023c).

Apalagi setelah adanya COVID-19 di Australia yang mendorong terjadinya lonjakan migrasi berskala besar. Hal tersebut disebabkan oleh dibukanya gerbang imigrasi Australia bagi pendatang asing dan juga banyaknya migran tetap tinggal di Australia selama COVID-19 (Department of Home Affairs, 2023c). Mengacu pada pernyataan Departemen Dalam Negeri Australia (Department of Home Affairs), tidak sedikit pemegang visa pelajar yang datang ke Australia dengan

motivasi utama bukan untuk menempuh pendidikan. Beberapa kasus yang umum terjadi di Australia seperti tinggal melebihi waktu yang ditentukan (*overstay*) maupun berpindah-pindah visa secara berulang (*visa hopping*). Isu-isu yang disebutkan sudah terjadi sejak lama di Australia dan potensi terburuknya adalah dideportasi untuk dikembalikan ke negara asalnya. Untuk itu, diperlukan upaya pencegahan, penegakan hukum, dan solusi yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan ini secara efektif (Department of Home Affairs, 2023b).

Hal tersebut mendorong Pemerintah Australia, di bawah kepemimpinan Anthony Albanese, untuk mereformasi sistem visa pelajar melalui kebijakan Genuine Student Test (GST) yang mulai berlaku pada 23 Maret 2024 (Department of Home Affairs, 2024b). Dalam salah satu dokumen Departemen Dalam Negeri Australia, dijelaskan bahwa pembentukan sistem GST berakar pada kebutuhan untuk menjaga agar program visa pelajar tetap selaras dengan tujuan utamanya, yakni sebagai sarana bagi individu yang bertekad untuk menempuh pendidikan secara sah di Australia, bukan sebagai celah untuk menyalahgunakan kebijakan imigrasi (Department of Home Affairs, 2024b).

Secara lebih spesifik, sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap mahasiswa asing yang masuk ke Australia memiliki motivasi belajar yang baik atau *genuine intention*, dan tujuan akademik yang jelas dengan menunjukkan relevansi program studi mereka dengan tujuan akademik atau karir, sehingga mencegah penggunaan visa untuk kepentingan lain. Melalui penerapan GST, pemerintah berupaya memperkuat integritas sistem visa, menyempurnakan proses

evaluasi aplikasi, serta memastikan bahwa hanya mereka yang memiliki komitmen nyata untuk belajar dan tinggal secara sementara (*temporary resident*) sesuai ketentuan yang dapat memperoleh izin tinggal di Australia (Department of Home Affairs, 2024b).

Selain untuk memastikan kesesuaian visa dengan tujuan utamanya, penerapan GST juga ditujukan untuk mengidentifikasi potensi adanya tujuan tersembunyi dari pemohon visa. Tujuan tersembunyi ini mengacu pada kemungkinan adanya motif yang tidak sesuai dengan kerangka studi yang sah dan diizinkan. Salah satu contohnya adalah penyalahgunaan visa studi untuk kepentingan non-akademik, seperti sekadar tinggal sementara tanpa mengikuti program studi secara aktif atau bahkan memanfaatkan visa tersebut untuk mendapatkan pekerjaan ilegal seperti prostitusi (Department of Home Affairs, 2021). Oleh karena itu, persyaratan visa pelajar yang semakin diperketat serta proses penilaian terhadap aplikasi visa dilakukan secara cermat oleh petugas imigrasi untuk memastikan bahwa hanya mereka yang memiliki *genuine intention* dan konsisten untuk menjalani studi sesuai ketentuan yang layak diberikan visa pelajar Australia (Department of Home Affairs, 2024b).

Oleh karena faktor di atas, pengetatan kebijakan imigrasi bagi pelajar internasional oleh pemerintahan Albanese perlu direalisasikan. *Pertama*, kebijakan ini bertujuan mengendalikan lonjakan migrasi pasca-COVID, yang mana mahasiswa berkontribusi dalam jumlah kedatangan yang mencapai 577.295 dengan target penurunan menjadi 250.000-an pada 2024–2025 (Department of Home

Affairs, 2025). *Kedua*, pemerintah merespons tekanan publik terkait krisis perumahan dan biaya hidup, meskipun pelajar internasional hanya menyumbang sekitar 4% dari permintaan sewa. *Ketiga*, upaya menjaga integritas sistem pendidikan dilakukan dengan menindak pelajar melalui penerapan Genuine Student Test (GST), peningkatan syarat bahasa Inggris, dan pembatasan perpindahan institusi (Department of Home Affairs, 2023c).

Meski kebijakan tersebut lahir dengan tujuan memperbaiki integritas sistem imigrasi Australia, implementasinya menimbulkan sejumlah pertanyaan baru, khususnya terkait dampaknya terhadap penerimaan mahasiswa internasional. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana kebijakan GST mempengaruhi penerimaan mahasiswa internasional di Australia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana implementasi Genuine Student Test dapat mempengaruhi penerimaan mahasiswa internasional di Australia?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yang meliputi tujuan umum dan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum, penelitian ini akan menjelaskan sekaligus menganalisis dampak implementasi kebijakan Genuine Student Test terhadap penerimaan

mahasiswa internasional, terutama untuk sektor Perguruan Tinggi dan VET di Australia.

1.3.2 Tujuan Khusus

Secara khusus, penelitian ini untuk menyajikan dampak dari kebijakan Genuine Student Test dengan analisis perbandingan terhadap penerimaan mahasiswa internasional pada sektor Perguruan Tinggi dan VET, baik sebelum maupun sesudah penerapan kebijakan tersebut.

1.4 Kegunaan Penelitian

Suatu hasil penelitian tentu memiliki tujuan penyebarluasan manfaat. Oleh demikian, penelitian ini memiliki dua kegunaan, yakni teoritis dan praktis:

1.4.1 Kegunaan Akademis

Manfaat akademis dalam penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan baru mengenai studi kebijakan imigrasi, khususnya Genuine Student Test, dan pendidikan internasional di Australia. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya yang membahas isu serupa.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi bagi Pemerintah Australia maupun sektor pendidikan dalam mengevaluasi dampak jangka panjang kebijakan Genuine Student Test terhadap penerimaan mahasiswa internasional di Australia.

1.5 Kerangka Pemikiran Konseptual

1.5.1 Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa literatur yang akan dijadikan acuan penelitian. Topik literatur yang dipilih yaitu membahas mengenai dampak kebijakan imigrasi terhadap penyerapan bibit unggul di suatu negara. Dalam penelitian oleh Thomas B. Smith. dengan judul penelitiannya adalah *The Policy Implementation Process* yang diterbitkan dalam jurnal *Policy Sciences* pada bulan Juni 1973 pembahasan meliputi konsep proses implementasi kebijakan dan tekanan yang dihasilkannya dalam masyarakat. Model proses implementasi kebijakan yang terdiri dari empat komponen utama: kebijakan ideal, organisasi pelaksana, kelompok sasaran, dan faktor lingkungan. Pentingnya mempertimbangkan intensitas dukungan pemerintah, sumber kebijakan, dan cakupan kebijakan dalam implementasi kebijakan. Mengidentifikasi faktor-faktor yang relevan dalam kelompok sasaran kebijakan, seperti tingkat organisasi, kepemimpinan, dan pengalaman kebijakan sebelumnya juga sangat penting. Adapun pembahasan mengenai peran organisasi pelaksana kebijakan dan tiga variabel kunci yang perlu dipertimbangkan dalam implementasi kebijakan.

Selain itu dalam jurnal yang berjudul *Immigration Policy and Immigrant Quality: The Australian Points System* yang disusun oleh Paul W. Miller tahun 1999, dibahas berbagai aspek terkait kebijakan imigrasi dan kualitas imigran di Australia, khususnya terkait dengan sistem poin Australia. penelitian ini membahas sejarah kebijakan imigrasi Australia, termasuk perubahan dari

kebijakan “White Australia” menuju kebijakan imigrasi non-diskriminatif. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan analisis kebijakan imigrasi dan kualitas imigran di Australia, dengan fokus pada sistem poin Australia. Dokumen ini menggunakan pendekatan analisis kebijakan untuk mengeksplorasi sejarah kebijakan imigrasi Australia, perubahan dalam asal negara imigran, serta dampak dari sistem poin Australia terhadap kualitas imigran yang masuk ke negara tersebut. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menyajikan informasi yang mendalam tentang bagaimana kebijakan imigrasi dan sistem poin Australia mempengaruhi seleksi imigran, kualitas tenaga kerja imigran, dan dampaknya terhadap pasar tenaga kerja Australia. Dengan menggunakan pendekatan analisis kebijakan, penelitian ini memberikan wawasan yang komprehensif tentang hubungan antara kebijakan imigrasi, sistem poin, dan kualitas imigran di Australia.

Selanjutnya adalah penelitian yang berjudul *Globalization and Changes in Australian International Migration* karya Graeme Hugo yang dirilis tahun 2006, membahas bagaimana globalisasi telah mengubah pola migrasi di Australia sejak 1990-an. Migrasi kini lebih beragam, mencakup migrasi keterampilan, sementara, pelajar internasional, dan sirkuler, menggantikan dominasi migran asal Eropa. Australia semakin fokus pada migrasi berbasis keterampilan dan peran strategis mahasiswa asing, terutama dari Asia-Pasifik. Batas antara migrasi sementara dan permanen pun menjadi kabur, karena mobilitas kini melayani berbagai tujuan. Adanya peran globalisasi, jaringan diaspora, dan industri transnasional juga memberikan peluang besar untuk

akses migrasi. Perubahan ini berdampak besar terhadap demografi dan hubungan luar negeri Australia, sehingga kebijakan migrasi harus terus beradaptasi. Globalisasi berperan ganda sebagai penyebab dan hasil dari peningkatan mobilitas internasional, menciptakan dinamika baru dalam sistem migrasi Australia yang menuntut pemahaman dan pendekatan yang lebih transnasional.

Kemudian, yang terakhir adalah dokumen yang berjudul *Migration Strategy: Getting Migration Work for The Nation*. Dokumen ini dirilis oleh Pemerintah Australia yang membahas secara komprehensif strategi migrasi Australia dengan fokus pada bagaimana negara tersebut merancang dan menyesuaikan kebijakan imigrasinya untuk menjawab kebutuhan ekonomi, sosial, dan regional yang terus berkembang. Dalam pembahasannya, jurnal ini mengulas upaya Australia untuk menyederhanakan sistem imigrasi agar lebih mudah diakses, meningkatkan integritas proses untuk mencegah penyalahgunaan, serta memastikan kebijakan yang diterapkan benar-benar efektif dan adaptif terhadap perubahan global. Jurnal ini juga menyoroti pentingnya migrasi tenaga terampil sebagai penunjang sumber daya manusia dan menjawab kekurangan tenaga kerja di sektor-sektor tertentu. Selain itu, kebijakan migrasi juga diarahkan untuk memperkuat kohesi sosial, meningkatkan kontribusi pendidikan internasional (khususnya peran mahasiswa asing) dan mendorong pembangunan wilayah di luar pusat kota besar. Dengan mengaitkan kebijakan imigrasi dengan strategi pembangunan

nasional dan diplomasi regional, terutama di kawasan Asia-Pasifik, jurnal ini menekankan perlunya pendekatan yang berkelanjutan dan responsif.

Dari literatur di atas, penulis menyimpulkan beberapa konseptual untuk dijadikan landasan berpikir dalam penelitian ini. Kerangka konseptual dalam penelitian ini mengintegrasikan penggunaan konsep migrasi internasional dan kebijakan publik untuk menganalisis dampak implementasi kebijakan Genuine Student Test (GST) di Australia terhadap penerimaan mahasiswa internasional pada sektor perguruan tinggi maupun VET. Konsep migrasi internasional membantu memahami dalam dinamika migrasi internasional, terutama dalam migrasi pendidikan. Kemudian, kebijakan publik digunakan untuk memahami proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan GST, serta bagaimana kebijakan ini dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dalam konteks keimigrasian dan pendidikan internasional.

1.5.2 Konsep Migrasi Internasional

Dalam menganalisis fenomena hubungan internasional, maka diperlukan alat analisis berupa teori ataupun konsep. Pada penelitian ini, penulis menggunakan konsep migrasi internasional untuk menjelaskan faktor di balik tingginya minat mahasiswa internasional untuk belajar di Australia. Dalam penelitian ini, penulis merujuk pada definisi migrasi internasional yang dikemukakan oleh Everett S. Lee (1966) dalam artikelnya *A Theory of Migration*. Lee mendefinisikan migrasi internasional sebagai perpindahan tempat tinggal secara permanen atau sementara dari satu negara ke negara lain.

Definisi ini bersifat luas dan tidak membatasi aspek geografis, bentuk perpindahan, maupun status dari migrasi tersebut. Konsep tersebut lebih menekankan pada aspek perubahan tempat tinggal dalam jangka waktu yang cukup lama, baik bersifat menetap maupun sementara. Kerangka pemikiran ini memudahkan migrasi internasional dipahami sebagai fenomena mobilitas lintas negara yang mencakup berbagai latar belakang tujuan dan motif.

Secara lebih spesifik, migrasi internasional melingkupi seluruh bentuk perpindahan lintas batas negara, mulai dari migrasi sukarela, seperti perpindahan untuk tujuan pekerjaan, pendidikan, atau reunifikasi keluarga, hingga migrasi paksa, seperti pengungsian akibat konflik atau bencana. Dengan pendekatan tersebut, definisi yang digunakan memberikan kerangka konseptual yang komprehensif namun tetap terarah dalam mengkaji fenomena migrasi lintas negara (Lee, 1966).

Berkaitan dengan migrasi internasional, adapun hal yang relevan dalam konsep ini yaitu *Push-Pull Factors* yang dibahas pada artikel yang berjudul *Theories of International Migration: A Review and Appraisal* karya Massey et al., 1993. Konsep ini menjelaskan bahwa proses migrasi dipengaruhi oleh dua faktor. *Pertama*, faktor pendorong (*push factors*), yaitu berbagai kondisi di negara asal yang mendorong individu untuk meninggalkan tempat tinggalnya. Hal ini bisa berupa terbatasnya akses terhadap pendidikan berkualitas, minimnya peluang kerja, atau bahkan situasi politik yang tidak stabil. *Kedua*, faktor penarik (*pull factors*), yakni berbagai hal di negara tujuan yang membuat

seseorang tertarik untuk datang. Sebagai contoh, kualitas pendidikan yang lebih baik, peluang kerja yang menjanjikan setelah menyelesaikan studi, lingkungan sosial yang kondusif, serta fasilitas penunjang lainnya yang menjadi daya tarik utama sehingga mendorong seseorang memilih negara tujuan tersebut (Massey et al., 1993). Dengan kata lain, keputusan untuk bermigrasi merupakan hasil dari keputusan meninggalkan suatu tempat dan harapan akan kehidupan yang lebih baik di tempat lain.

Dalam konteks ini, Australia sebagai salah satu negara tujuan utama migrasi internasional memiliki daya tarik yang kuat, khususnya dalam sektor pendidikan. Reputasi Australia sebagai pusat pendidikan berkualitas global menjadi salah satu faktor yang menjadikannya magnet bagi pelajar internasional (Locke, 2020). Karena Australia ingin mempertahankan citranya sebagai *host country* pendidikan internasional (Department of Home Affairs, 2023c). Oleh karena itu, fenomena ini mengindikasikan bahwa Australia memiliki faktor pendorong yang tercermin melalui sektor pendidikan menjadi instrumen strategis dalam arus migrasi internasional. Namun, tingginya arus masuk pelajar internasional juga membawa konsekuensi, sehingga Pemerintah Australia harus merilis kebijakan imigrasi sebagai respon pemerintah terkait isu di khalayak publik.

Dalam hal ini, menurut Liu-Farrer (2009), kebijakan imigrasi menjadi salah satu instrumen utama untuk mengatur mobilitas penduduk lintas negara. Menyadari kompleksitas tantangan migrasi, Pemerintah Australia melalui

kepemimpinan Perdana Menteri Anthony Albanese merancang transformasi kebijakan imigrasi agar lebih adaptif dan terintegrasi dengan agenda pembangunan nasional (Department of Home Affairs, 2023a). Oleh karena itu, Anthony Albanese akhirnya merilis kebijakan Genuine Student Test yang merupakan salah satu kebijakan imigrasi di Australia sebagai kebijakan administratif dalam upaya mendapatkan visa pelajar.

1.5.3 Konsep Kebijakan Publik

Definisi kebijakan publik dalam penelitian ini merujuk pada interpretasi dari Harold Lasswell, yaitu seorang ilmuwan politikus terkemuka di Amerika yang juga seorang pencetus teori komunikasi. Menurut Harold Lasswell, kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai “keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat” (Lasswell & Lerner, 1951). Lasswell mengemukakan bahwa kebijakan publik dipahami sebagai suatu proses atau rangkaian kegiatan yang melibatkan identifikasi masalah, pencarian solusi, dan implementasi tindakan untuk mencapai tujuan tertentu yang berorientasi pada kepentingan umum. Berangkat dari penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa kebijakan publik melibatkan banyak proses yang cukup kompleks dan terstruktur. Perilisan suatu kebijakan bukan hanya sebatas untuk hasil akhirnya saja, tetapi juga dijadikan sebagai instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah publik (*public issue*). Proses ini tidak hanya melibatkan pemerintah tetapi juga berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*), termasuk masyarakat dan institusi lainnya, yang berperan aktif dalam memberikan masukan dan memengaruhi

arah kebijakan. Dengan demikian, kebijakan publik mencakup berbagai dimensi dan dapat memberikan dampak pada banyak sektor kehidupan.

Dalam penelitian Easton (1950) berjudul "*Harold Lasswell; Policy Scientist for a Democratic Society*", Lasswell juga menekankan pentingnya orientasi kebijakan (*policy orientation*) dalam studi ilmu politik, yaitu mengarahkan perhatian pada proses pengambilan keputusan pemerintah untuk memecahkan masalah sosial. Selain itu, Lasswell menekankan pendekatan *problem-oriented*, di mana kebijakan harus berfokus pada penyelesaian persoalan sosial nyata. Konsep *policy cycle* juga menjadi salah satu kontribusinya, dengan menguraikan tahapan proses kebijakan mulai dari *tahap* perumusan kebijakan hingga evaluasi. Lasswell beranggapan bahwa *policy scientist*, yaitu pakar kebijakan, memiliki peran besar tidak hanya dalam analisis, tetapi juga dalam perumusan dan evaluasi kebijakan berbasis data. Selain itu, Lasswell juga meluncurkan sebuah gagasan bernama *science of man*, yaitu ilmu tentang manusia, yang dapat menjadi panduan dalam menentukan arah tujuan kebijakan sosial.

Diperkuat dalam jurnal yang berjudul *Policy Implementation Process*, Thomas B. Smith (1973) juga menjabarkan terkait proses pembuatan kebijakan publik terdiri dari beberapa tahapan yang kompleks. *Pertama*, identifikasi masalah yang perlu diatasi, di mana masalah-masalah tersebut diangkat berdasarkan kebutuhan masyarakat atau situasi yang memerlukan intervensi pemerintah. *Kedua*, perumusan tujuan yang ingin dicapai melalui kebijakan

tersebut, yang biasanya melibatkan penetapan sasaran spesifik dan terukur. *Ketiga*, analisis solusi yang mungkin, perlunya alternatif kebijakan yang dapat diterapkan serta penilaian terhadap keuntungan dan kerugian masing-masing alternatif. *Keempat*, implementasi kebijakan, yaitu pelaksanaan keputusan yang telah diambil dengan cara-cara tertentu dan dalam kerangka waktu yang telah ditentukan. Dan *kelima*, evaluasi dampak kebijakan, di mana kinerja kebijakan tersebut diukur dan dianalisis untuk mengetahui apakah tujuan awal tercapai dan untuk mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan.

Dalam konteks kebijakan publik, Genuine Student Test merupakan instrumen seleksi yang digunakan oleh Pemerintah Australia untuk memastikan bahwa pemohon visa pelajar memenuhi kriteria sebagai mahasiswa yang memiliki *genuine intentions*, bukan sekadar mencari jalur masuk ke negara tersebut. Pemerintah Albanese merilis kebijakan GST dengan meningkatkan standarisasi sebagai faktor penilaian administratif guna memperketat sistem imigrasi Australia, khususnya visa pelajar. Pemerintah Albanese merilis kebijakan GST ini diperlukan sebagai upaya mengantisipasi masalah yang mungkin muncul selama masa studi pelajar internasional di Australia, sehingga pemerintah ingin kebijakan ini tetap mendukung mereka agar tetap sejalan dalam mencapai tujuannya.

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Definisi Konseptual

1.6.1.1 Pendidikan Internasional

Dalam artikelnya yang berjudul *Educationally Channeled International Labor Mobility: Contemporary Student Migration from China to Japan* (2009), Liu-Farrer memberikan pemahaman konseptual yang komprehensif mengenai pendidikan internasional. Menurutya, pendidikan internasional merujuk pada proses pembelajaran yang berlangsung ketika individu, baik siswa, mahasiswa, maupun peserta didik lainnya, menempuh studi di luar negara asal mereka melalui program pendidikan yang diakui secara internasional atau berbasis di negara lain. Konsep ini tidak sekadar menggambarkan aktivitas akademik lintas batas, melainkan juga melibatkan pertukaran pengetahuan, keterampilan, budaya, dan nilai-nilai antarbangsa. Lebih dari itu, proses pendidikan internasional sering kali difasilitasi oleh kebijakan imigrasi dan regulasi negara tujuan yang memungkinkan peserta didik memperoleh status hukum, termasuk akses untuk bekerja paruh waktu selama masa studi.

Pendidikan internasional, sebagaimana dikemukakan oleh Liu-Farrer, tidak dapat dipandang sebatas sebagai aktivitas transfer ilmu pengetahuan antarnegara. Lebih dari itu, pendidikan lintas negara merupakan bagian integral dari arus globalisasi yang semakin mempererat keterkaitan antara mobilitas pendidikan dan migrasi tenaga

kerja internasional (Shields, 2013). Dalam kerangka ini, pendidikan internasional memiliki fungsi ganda: di satu sisi sebagai instrumen peningkatan kapasitas individu melalui penguasaan ilmu dan keterampilan, dan di sisi lain sebagai bentuk investasi sumber daya manusia yang memiliki implikasi langsung terhadap dinamika pasar tenaga kerja global, pertukaran budaya, serta pembentukan jejaring sosial dan ekonomi lintas batas. Oleh karena itu, pendidikan internasional harus dipahami sebagai strategi global, bukan sekadar keputusan individu semata (Liu-Farrer, 2009).

Dalam konteks Australia, program kerja migrasi pendidikan semasa kepemimpinan Perdana Menteri Anthony Albanese tertuang dalam dokumen *Migration Strategy: Getting Migration Working for The Nation* yang mana Anthony Albanese membahas terkait penetapan standar visa yang lebih tinggi untuk pelajar internasional. Karena pendidikan internasional bukan hanya mendatangkan keuntungan ekonomi melalui sektor pendidikan, tetapi juga membawa konsekuensi terhadap pola migrasi yang lebih kompleks. Argumen inilah yang kemudian menjadi relevan dalam membingkai analisis terhadap kebijakan penerimaan mahasiswa internasional di Australia, khususnya melalui kebijakan GST.

1.6.1.2 Kebijakan Imigrasi

Dalam penggunaan definisi kebijakan imigrasi, penulis menggunakan perspektif dari Paul W. Miller (1999). Kebijakan imigrasi didefinisikan sebagai serangkaian aturan, regulasi, serta tindakan pemerintah yang bertujuan untuk mengatur keluar masuknya warga negara asing ke dalam suatu negara (Miller, 1999). Dalam praktiknya, kebijakan ini mencakup sejumlah aspek penting yang saling berkaitan.

Salah satu aspek mendasar dalam memahami kebijakan imigrasi adalah dengan membedakan jenis-jenis individu yang berpindah lintas wilayah atau negara. Dalam hal ini, istilah *migrant* dan *immigrant* kerap muncul dalam diskusi imigrasi, namun keduanya memiliki makna yang berbeda. *Migrant* merujuk pada seseorang yang berpindah tempat, baik antarwilayah dalam satu negara maupun antarnegara, dengan tujuan yang bersifat sementara atau permanen, seperti urusan pendidikan, pekerjaan, atau mendapatkan kondisi hidup yang lebih baik. Sementara itu, *immigrant* adalah individu yang pindah ke negara lain dengan niat menetap secara permanen, termasuk di dalamnya pengungsi dan pencari suaka. Walaupun keduanya dikategorikan sebagai pendatang, tetapi mereka dibedakan berdasarkan faktor dan durasi mereka akan menetap (Dini et al., 2023).

Pemahaman mengenai perbedaan tersebut menjadi penting karena setiap kategori pendatang membawa konsekuensi kebijakan yang

berbeda pula. Maka dari itu, kebijakan imigrasi menetapkan syarat dan ketentuan mengenai siapa yang diperbolehkan masuk dan menetap di suatu negara sebagai bentuk pengendalian (*immigration control policy*), baik untuk sementara maupun permanen (Meyers, 2000). Aturan ini tidak hanya berlaku untuk tujuan wisata, tetapi juga untuk bekerja, belajar, atau bahkan menetap secara permanen. Berfokus pada kategori mahasiswa internasional, kebijakan imigrasi mengatur kebijakan soal izin belajar, yang memungkinkan imigran untuk menempuh pendidikan ke negara tujuan. Salah satu syaratnya yaitu harus dengan menggunakan visa pelajar, sebagai dokumen perjalanan yang sah untuk memasuki wilayah suatu negara.

Dalam konteks Australia, kebijakan imigrasi mencakup berbagai skema visa, termasuk visa pelajar internasional. Penelitian ini secara khusus menyoroti kebijakan imigrasi di bawah pemerintahan Anthony Albanese, terutama kebijakan GST. Kebijakan ini merupakan salah satu persyaratan agar mahasiswa dapat memperoleh visa pelajar.

1.6.2 Definisi Operasional

1.6.2.1 Migrasi Pendidikan

Migrasi pendidikan dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai perpindahan individu dari negara asalnya ke negara tujuan dengan tujuan utama untuk memperoleh pendidikan formal di institusi pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan tinggi. Dalam konteks

penelitian ini, migrasi pendidikan merujuk pada kedatangan mahasiswa internasional ke Australia yang difasilitasi melalui visa pelajar (*student visa*), dengan program studi yang diakui secara legal oleh Pemerintah Australia.

Untuk mengukur fenomena migrasi pendidikan, penelitian ini menggunakan data statistik jumlah penerbitan visa pelajar internasional yang diterbitkan oleh Pemerintah Australia melalui Departemen Dalam Negeri. Periode data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tahun 2018 hingga 2024 untuk memberikan gambaran mengenai tren penerimaan mahasiswa internasional sebelum dan sesudah penerapan kebijakan GST.

1.6.2.2 Kebijakan Imigrasi

Dalam penelitian ini, kebijakan imigrasi dioperasionalkan sebagai kebijakan GST yang diberlakukan oleh Pemerintah Australia pada Maret 2024. Analisis operasional mencakup isi dari kebijakan GST, tujuan implementasinya, serta bagaimana kebijakan ini memengaruhi tren penerimaan mahasiswa asing di Australia dalam periode sebelum dan sesudah diberlakukannya GST. Data yang digunakan mencakup statistik visa pelajar, pernyataan resmi pemerintah, serta interpretasi atas perubahan arah kebijakan selama masa pemerintahan Anthony Albanese.

Secara spesifik, kebijakan ini mencakup berbagai prosedur dan kriteria yang harus dipenuhi oleh pelajar internasional untuk bisa lolos dalam penyeleksian tersebut.

1.7 Argumen Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis berargumen bahwa kebijakan Genuine Student Test yang diterapkan sebagai salah satu cara mendapatkan *student visa* yang diterapkan oleh pemerintah Anthony Albanese berpotensi menurunkan jumlah penerimaan mahasiswa internasional karena adanya seleksi yang lebih ketat terhadap tujuan dan motivasi akademik calon mahasiswa. Meskipun kebijakan ini dirancang untuk menjaga integritas sistem imigrasi dan memastikan bahwa hanya mahasiswa yang memiliki *genuine intention* yang diterima, implementasinya dapat berdampak pada berkurangnya daya tarik Australia sebagai destinasi pendidikan internasional.

1.8 Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode kualitatif. Menurut Moleong (2017) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata. Dalam konteks penelitian ini, metode kualitatif berguna untuk dapat memahami dan menganalisa dampak dari implementasi kebijakan Genuine Student Test (GST) dalam kebijakan keimigrasian Australia di bawah pemerintahan Anthony Albanese.

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Secara garis besar, penelitian eksplanatif berusaha menjelaskan hubungan dan pengaruh dari suatu fenomena. Dimana dengan menggunakan tipe penelitian eksplanatif, seluruh data mengenai pemegang *student visa* akan dilakukan penelaahan dan analisis secara mendalam mengenai dampak dari penerapan kebijakan GST terhadap penerimaan mahasiswa internasional di Australia.

1.8.2 Situs Penelitian

Penulis melakukan penelitian di sejumlah situs online, seperti website resmi Australian Government, Department of Education, Department of Home Affairs, Australian Bureau of Statistic (ABS) terkait permasalahan kebijakan imigrasi di Australia secara komprehensif, serta tidak menutup kemungkinan akan merujuk pada situs online lainnya.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek yang diteliti adalah target penelitian yang telah ditetapkan oleh penulis. Subjek pada penelitian ini merupakan mahasiswa internasional terkhusus kategori Perguruan Tinggi (*Higher Education*) dan VET (Vocational Education and Training) sebagai aplikasi visa pelajar dan juga Anthony Albanese sebagai pembuat kebijakan.

1.8.4 Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Data kualitatif merujuk pada informasi yang diperoleh dari observasi, dokumentasi, atau

sumber lain yang bersifat deskriptif dan tidak dapat diukur secara numerik. Data kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam tentang konsep, persepsi, sikap, dan konteks yang melibatkan interpretasi dan analisis makna dari informasi yang dikumpulkan. Data kualitatif membantu penulis untuk menjelaskan fenomena yang diamati.

1.8.5 Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan sumber data sekunder. Penggunaan data sekunder diperoleh studi literatur berbagai jenis dokumen seperti buku, artikel, jurnal, laporan, media massa dan segala jenis dokumen terkait penelitian.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur. Studi literatur sebagai penelitian yang berhubungan dengan membaca, mengumpulkan, mencatat, menyortir, kemudian mengelola literatur yang sudah didapat, serta menghubungkan antar referensi terkait dengan topik penelitian yang dibahas (Ridley, 2012). Dengan penggunaan studi literatur, penulis akan mengumpulkan, membaca, dan mengevaluasi literatur yang ada untuk memperoleh pemahaman yang mendalam serta mengolah sumber informasi yang didapatkan ke dalam penelitian.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data dalam penelitian ini melibatkan pengorganisasian data, mengembangkan tema, dan menghubungkan temuan dengan proposisi

penelitian. Interpretasi data adalah proses menjelaskan makna temuan dan memberikan implikasinya. Interpretasi berfokus pada pemberian makna terhadap hasil analisis data, baik melalui penjelasan uraian atau capaian data, maupun dengan mencari relevansi hubungan antar dimensi uraian. Oleh karena itu, data dalam penelitian ini dianalisis secara komprehensif menggunakan metode *process-tracing*, yang mempelajari bagaimana suatu kebijakan publik diimplementasikan dan dampaknya pada masyarakat (Bennett & Checkel, 2014).

1.8.8 Kualitas Data

Mengenai kualitas data yang digunakan dalam penelitian, evaluasi data dilakukan berdasarkan kredibilitas dan transferabilitas. Penelitian kualitatif dikatakan memiliki kredibilitas tinggi dilihat pada sumber data, pengumpulan data, atau perspektif berbeda untuk memverifikasi temuan (Creswell & Creswell, 2023). Sementara, transferabilitas dinilai dari validitas eksternal, sejauh mana pembaca yakin bahwa temuan penelitian dapat diterapkan pada situasi atau kelompok lain yang mirip.